

# Laporan Tahunan

Inspektorat BIG

20  
23



# LAPORAN **TAHUNAN** INSPEKTORAT BADAN INFORMASI GEOSPASIAL **2023**

## **Tim Penyusun**

Inspektorat Badan Informasi Geospasial

## **Pengarah**

Habib Subagio

## **Penanggung Jawab**

Roswidyatmoko Dwihatmojo

## **Tim Redaksi**

Al-Iqbal Fatiha Bhinar Jaya  
Dede Setiadi  
Dian Ayu Wardani  
Dita Christy  
Elfarizki Naufal Atantyo  
Irba Zahra Salsabila  
Leroy Mabel Gantara  
Rafli Dwi Prasetyo Mohammad

## **Kontributor**

Novianto  
Cecep Hamdani  
Ary Prasetya  
Rochiyatun  
Erning Ditta Dyah Satyarini  
Dino Eka Putra  
Febrian Sabtareno  
Iqromatul Fadliyah  
Yoyoh Maesaroh

## **Editor**

Rochiyatun  
Iqromatul Fadliyah

## **Tata Letak dan Desain**

Al-Iqbal Fatiha Bhinar Jaya

## **Inspektorat**

### **Badan Informasi Geospasial**

Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 46,  
Cibinong Science Center, Bogor, Jawa Barat 16911  
Telefax: 021-875 1655  
Email: [info.inspektorat@big.go.id](mailto:info.inspektorat@big.go.id)

# LAPORAN **TAHUNAN** INSPEKTORAT BIG

## DAFTAR ISI

### SELAYANG PANDANG

Sambutan <b>Inspektur</b>	2
---------------------------	---

### KILAS KINERJA

Capaian & <b>Prestasi</b>	6
Capaian <b>Kinerja 2023</b>	8
Realisasi <b>Anggaran 2023</b>	8
Rekap <b>Kinerja 2023</b>	10

### PROFIL

Tugas & <b>Fungsi Inspektorat</b>	18
Struktur <b>Organisasi Inspektorat</b>	19
Tim & <b>Personil Inspektorat</b>	20

### CAPAIAN KINERJA

<b>Audit</b>	24
Audit <b>Kinerja</b>	24
Audit <b>PNBP</b>	25
Audit <b>PIIG</b>	25
<b>Reviu</b>	26
Reviu <b>Laporan Keuangan</b>	26
Reviu <b>PIPK</b>	26
Reviu <b>Laporan Kinerja</b>	26
Reviu <b>Tunjangan Kinerja</b>	27
Reviu <b>Revisi DIPA DJA</b>	27
Reviu <b>Penyusunan RKA-K/L</b>	27
Reviu <b>RK-BMN</b>	27
<b>Evaluasi</b>	28
Evaluasi <b>AKIP</b>	28
<b>Pemantauan</b>	30
Pemantauan <b>TL Inspektorat</b>	30
Pemantauan <b>TLRHP BPK-RI</b>	31
<b>Pengawasan Lainnya</b>	32
Kegiatan <b>AFK</b>	33
Pemantauan <b>LHKAN</b>	33
Pelatihan <b>Penguatan JFA</b>	34
Penguatan <b>Kapabilitas APIP</b>	35
Telaah <b>Sejawat</b>	35
Pengendalian <b>Gratifikasi</b>	36
Penanganan dan Pengelolaan <b>Dumas &amp; WBS</b>	38
Pembangunan <b>ZI Menuju WBK/WBBM</b>	39
Penilaian <b>Maturitas SPIP Terintegrasi</b>	40
Pencegahan <b>Benturan Kepentingan</b>	41
Evaluasi Internal <b>Reformasi Birokrasi</b>	42
<b>Inovasi: Dashboard Pengawasan</b>	43
<b>Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan</b>	44





1

---

# SELYANG PANDANG

---

---

## SAMBUTAN INSPEKTUR

---



**S**yukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah kesehatan dan dengan lindungan-Nya sampai hari ini kita semua bisa melampaui Tahun 2023 sebagai titik balik pasca pandemi Covid-19. Tahun 2023 Badan Informasi Geospasial (BIG) bergerak cepat mengejar ketertinggalan target capaian kinerja yang sempat mengalami *delay* akibat pandemi Covid19, termasuk kembali menyelaraskan capaian pelaksanaan anggaran APBN. Terbukti serapan anggaran BIG mencapai 98,87%. Capaian ini tentu diupayakan melalui sinergi dan kolaborasi semua unsur unit kerja. Capaian ini memberikan dukungan bagi pimpinan saat evaluasi program dan kegiatan 2023 oleh mitra Komisi VII DPR. Disisi lain, pertanggungjawaban anggaran yang masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK, semoga predikat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya dapat kita peroleh kembali.

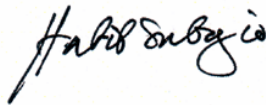
Kinerja Inspektorat mendukung pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengendalian Internal BIG” yang diukur dengan tujuh (7) Indikator Kinerja. Buku ini menyampaikan representasi aktivitas Inspektorat BIG selama Tahun 2023 dalam mencapai target seluruh indikator tersebut. Peran Auditor Internal (APIP) semakin penting mengawal seluruh kegiatan di BIG. Kompetensi SDM APIP menjadi kunci pengendalian internal dalam menangani seluruh rangkaian kegiatan mulai saat penyusunan (perencanaan), pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan sampai memenuhi kriteria akuntabel.

Dinamika dan perubahan tata kelola birokrasi pemerintahan menjadi hal yang selalu kita antisipasi untuk mencapai tujuan organisasi (lembaga). Dalam hal ini, Inspektorat bersiap menyusun strategi bahwa APIP harus selalu mempertimbangkan kombinasi antara penguatan fungsi *consulting & assurance*, pengetahuan yang mendalam tentang risiko dan pengembangan tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Strategi ini akan membimbing paradigma APIP bergeser dari *Problem Finders* menjadi *Problem Solver*, serta mereposisi Inspektorat sebagai mitra kerja.

Buku Tahunan ini memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat. Garis besar kegiatan yang dilakukan merupakan implementasi PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Terima kasih kepada seluruh jajaran Inspektorat serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2023, diharapkan Buku Tahunan yang telah tersusun ini dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban Inspektorat BIG dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Cibinong, Januari 2024

Inspektur



Dr. Habib Subagio, S.Si., M.Si.



Issue 704  
Monday, Jun 14, 2018  
#CrystallineNews

# BUSINESS

## Economy of the European Union

Branding is defined as the process of coming up or making a unique name or design for a product. It is a long-term strategy that allows you to build a reputation in your market, increase sales, and differentiate your products from your competitors.

Are you innovative or are you the government? If you are a high-cost, high-quality product, you should consider branding. You should also consider branding if you are a low-cost, low-quality product. Branding is a long-term strategy that allows you to build a reputation in your market, increase sales, and differentiate your products from your competitors.

Are you innovative or are you the government? If you are a high-cost, high-quality product, you should consider branding. You should also consider branding if you are a low-cost, low-quality product. Branding is a long-term strategy that allows you to build a reputation in your market, increase sales, and differentiate your products from your competitors.



Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Assets	1,000,000	1,050,000	1,100,000	1,150,000	1,200,000	1,250,000	1,300,000
Total Liabilities	500,000	550,000	600,000	650,000	700,000	750,000	800,000
Total Equity	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Revenue	1,000,000	1,050,000	1,100,000	1,150,000	1,200,000	1,250,000	1,300,000
Expenses	500,000	550,000	600,000	650,000	700,000	750,000	800,000
Net Income	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

8:30 AM  
2:45 PM  
\* Call  
Book Flight  
Sat,

CASH





# 2

# KILAS KINERJA

- Marketing System meeting  
- Review PPT user manual  
John again to arrange meeting

Flight to Sydney  
10:00 AM  
Flight: SP1675

Meeting  
organize new system  
develop social selling  
dashboard

BOOK



No	Description	Subtotal
1224	Id Eulum	
2587	Sed interdum odio	
0034	Penetrasque	
4720	Maecenas molestie	
4650	Integer varius risus	
4893	Quisque luctus turpis	
TOTAL Due		

# CAPAIAN & PRESTASI

## PRESTASI PERSONIL



Irba Zahra Salsabila (Auditor Pelaksana) menghadiri kegiatan Yudisium Peserta Lulusan *Certified Government Accounting Associate* (CGAA) di Balai Kartini Jakarta yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)



Pada tahun 2023 melalui Nota Dinas Inspektur Nomor B-20.4/INSP/KP.03.03/11/2023 tanggal 20 November 2023, Inspektorat mengusulkan kandidat Best Employee yaitu Iqromatul Fadliyah, Dino Eka Putra, dan Febrin Sabtareno. Dari ketiga kandidat, yang terpilih untuk lanjut tahap seleksi se-BIG adalah Iqromatul Fadliyah.



Irba Zahra Salsabila mengikuti Final Lomba Cerdas Cermat Kategori Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam rangka Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023. kegiatan ini diikuti oleh beberapa perwakilan Kementerian/Lembaga.



Dua orang personil Inspektorat, yaitu Rochiyatun dan Erning Ditta Dyah Satyarini, pada tahun 2021 memperoleh kesempatan melanjutkan studi S2 melalui mekanisme tugas belajar. Rochiyatun memperoleh beasiswa BIG dan Erning Ditta DS memperoleh beasiswa SAINTEK. Keduanya melanjutkan studi S2 di Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Studi S2 tersebut diselesaikan dalam 3 semester dan lulus dengan predikat *cumlaude*.

Tesis yang dihasilkan yaitu:

1. "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal pada Proses Pengelolaan dan Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial pada Badan Informasi Geospasial" oleh Erning Ditta DS
2. "Penerapan Manajemen Risiko sebagai Indikator Penilaian Kinerja: Studi Kasus pada Unit Pengelola Data Pasang Surut - Badan Informasi Geospasial" oleh Rochiyatun

# CAPAIAN KINERJA 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
Persentase (%) Penyampaian Laporan Wajib Laport LHKPN dan LHKASN	%	92%	96,04% (TW 3) 97,80% (TW 4)
Nilai Maturitas SPIP BIG	Nilai	3,4	4,06
Deviasi Nilai PMPRB (Evaluasi RB) dengan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan KemenPANRB	%	14%	7,75%
Persentase (%) hasil temuan audit eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi atas temuan hasil audit tahun sebelumnya	%	90%	100%
Jumlah Unit Kerja Eselon I dengan nilai Hasil Evaluasi SAKIP>70	Unit	4 Unit	4 Unit
Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3	3,46
Nilai Reformasi Birokrasi pada komponen Pengungkit (Pemenuhan dan Reform)	Nilai	8,8	9,21

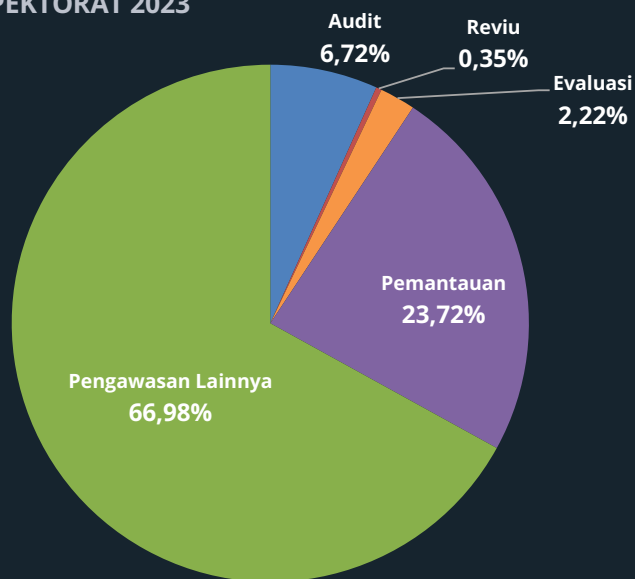
# REALISASI ANGGARAN 2023

Rincian Output	Target	Anggaran	Realisasi		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
Laporan Hasil Audit	3 Dokumen	127.758.000	127.687.000	99,94	71.000	0,06
Laporan Hasil Reviu	10 Dokumen	6.680.000	6.175.000	92,44	505.000	7,56
Laporan Hasil Evaluasi	4 Dokumen	42.278.000	42.170.145	99,74	107.855	0,26
Laporan Hasil Pemantauan	3 Dokumen	450.278.000	446.054.963	99,06	4.223.037	0,94
Laporan Hasil Pengawasan Lainnya	11 Dokumen	1.273.006.000	1.256.433.012	98,70	16.572.988	1,3
<b>Total</b>		<b>1.900.000.000</b>	<b>1.878.520.120</b>	<b>98,87</b>	<b>21.479.880</b>	<b>1,13</b>

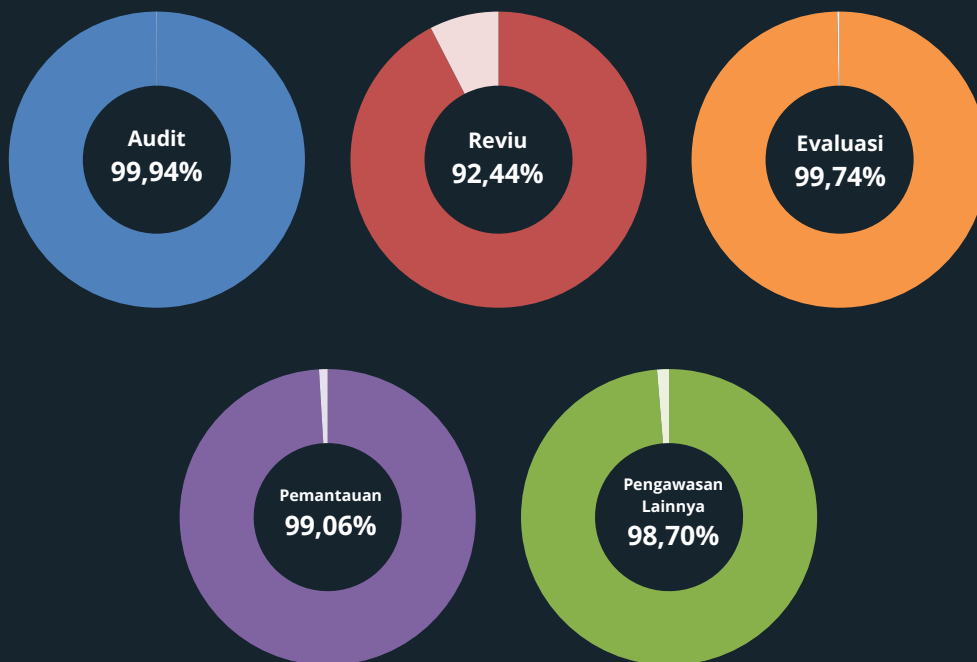
# GRAFIK

## ANGGARAN 2023

### ALOKASI ANGGARAN INSPEKTORAT 2023



### REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT 2023



# RIWAYAT KINERJA 2023

## JANUARI

### Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022



(11/1) Pelaksanaan *Entry Meeting* atas Pemeriksaan Laporan Keuangan K/L Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Auditor Utama Keuangan Negara III Nomor 3/S/XVI/01/2023 tanggal 6 Januari 2023. Disampaikan dalam acara tersebut bahwa BPK mengharapkan kerja sama yang baik antara Tim Pemeriksa dengan entitas K/L selama proses pemeriksaan dilaksanakan, termasuk dukungan data dan informasi terkait proses pemeriksaan agar diberikan dengan cepat dan tepat. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa BIG termasuk instansi dengan jumlah status tindak lanjut "sesuai dengan rekomendasi" di atas 90%.

### Sosialisasi Pelaporan LHKPN



(12/1) Sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari KPK dilaksanakan secara daring yang diikuti oleh wajib lapor LHPKN. Tujuan diadakannya sosialisasi ini untuk memberi penjelasan teknis terhadap pelaksanaan pelaporan serta pengisian aplikasi LHKPN dan juga mempertahankan tingkat kepatuhan pelaporan 100% LHKPN di lingkungan Badan Informasi Geospasial.

## FEBRUARI

### Pendampingan Pengecekan Fisik BMN bersama Pemeriksa BPK-RI di Aceh



(13/2 - 17/2) Pemeriksa BPK-RI melakukan pengecekan fisik BMN terhadap 6 Stasiun Pasang Surut dan CORS yang tersebar di beberapa lokasi yaitu Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa keseluruhan Stasiun Pasang Surut dan CORS dalam kondisi baik dan berfungsi.

### Diskusi Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2023



(6/2) Inspektorat bersama Biro Umum dan Keuangan beserta Biro PKH berinisiatif untuk melaksanakan diskusi tersebut. Acara ini diikuti oleh PPK, PPSPM, Pengelola Keuangan dan perwakilan dari unit teknis. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bersama dalam pengelolaan anggaran dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

## MARET

### Workshop Implementasi SAKIP

(1/3) Inspektorat BIG mengundang narasumber dari Kementerian PANRB dan BKKBN untuk membahas terkait Evaluasi SAKIP yang telah diatur dalam Permenpanrb No.88 Tahun 2021 juga adanya berbagi pengetahuan dalam mengevaluasi SAKIP di masing-masing K/L.



### Workshop Telaah Sejawat

(13/3) Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pengawasan intern APIP, diperlukan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas/*Quality Assurance Improvement Program* (QAIP) secara berkesinambungan. Program pengembangan dan penjaminan kualitas ini harus mencakup penilaian intern dan ekstern. Penilaian intern dilakukan oleh APIP masing-masing sedangkan penilaian ekstern dilakukan dengan melibatkan pihak independen dalam hal ini AAIP (Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia) melalui telaah sejawat (*peer review*). Inspektorat BIG melaksanakan workshop telaah sejawat bersama Komite Telaah Sejawat AAIP dan Inspektorat ANRI.



## APRIL

### Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2022

(27/3) Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja unit kerja yang disusun secara periodik sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun ini, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Inspektorat terhadap semua unit eselon I BIG, yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Kedeputan Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial dengan nilai 79,6.



## MEI

### Pembangunan Zona Integritas

(5/4) Sesuai Surat Menteri PANRB Nomor B/23/PW.00/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023, Inspektorat memulai serangkaian pengusulan Pembangunan ZI WBK dengan melakukan penjelasan terkait teknis pengusulan unit kerja pembangunan ZI yang menghadirkan beberapa perwakilan tim pembangunan zona integritas pada unit kerja.



## JUNI

### Expo Pengawasan Intern di Jakarta

(19/6) BPKP mengundang beberapa Inspektorat Kementerian/Lembaga untuk berpartisipasi dalam kegiatan Expo Pengawasan Intern yang diselenggarakan di Pendopo Agung Sasono Langen Utamo, TMII Jakarta dengan tema "inovasi dan kolaborasi pengawasan adaptif untuk pertumbuhan berkelanjutan". Tujuan dari kegiatan ini adalah menjadi ajang bagi peserta dapat memperluas jaringan dalam membangun kemitraan dengan sesama aparat pengawasan intern, mempromosikan hasil-hasil pengawasan serta membagikan pengetahuan tentang inovasi dan praktik terbaik dalam pengawasan.



## JULI

### Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BIG Tahun Anggaran 2022



(10/7) Kepala BIG bersama dengan pimpinan Kementerian/Lembaga di lingkungan AKN III BPK-RI menerima penyerahan LHP atas LK BIG Tahun Anggaran 2022. Dari 34 Kementerian/Lembaga, 33 di antaranya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI termasuk BIG. LHP diserahkan oleh Anggota III BPK-RI yaitu Bapak Achsanul Qosasi. Dalam arahnya, beliau menyampaikan bahwa masih adanya temuan berulang dan signifikan dan diharapkan tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu ada strategi percepatan penyelesaian dengan berkomunikasi secara aktif antara BPK dan entitas.

### Pelaksanaan Audit Pekerjaan Maintenance Support Fasilitas DC dan Maintenance Support DC Analog pada Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial



(25/7) Salah satu tahapan dalam pelaksanaan audit adalah pembahasan temuan audit sementara dengan auditi. Tujuan dari pembahasan temuan audit sementara adalah untuk memperoleh tanggapan dan konfirmasi tentang temuan yang dikemukakan oleh auditor sehingga hasil audit akhir dapat membantu manajemen (auditi) untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola serta operasionalnya.

## AGUSTUS

### Soft Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja atas Program Percepatan Pemetaan Nasional Skala Besar



(9/8) Tim Pemeriksa Kinerja BPK-RI menyampaikan bahwa dalam kegiatan pemeriksaan kinerja akan dilakukan dengan 2 tahap yaitu pendahuluan dan rinci. Pemeriksaan pendahuluan akan berfokus pada permasalahan apa saja pada kegiatan percepatan pemetaan nasional skala besar sehingga nantinya akan dibuat kriteria yang sesuai. Sedangkan pemeriksaan terinci akan mendalami apa yang sudah menjadi permasalahan.

### Asistensi Pekerjaan pada Tanah milik BIG di Kecamatan Leuwiliang



(10/8) Inspektorat bersama dengan Biro Umum dan Keuangan melaksanakan asistensi pekerjaan pembangunan pagar di tanah milik BIG yang terletak di Kecamatan Leuwiliang. Pekerjaan pembangunan pagar ini bertujuan untuk pengamanan, penanda, dan pembatas antar suatu lahan dengan lahan lainnya. Hasil asistensi diketahui bahwa tanah masih berupa lahan terbuka dan memiliki kontur tanah yang beragam mulai dari datar hingga curam.



## SEPTEMBER

### Reviu RKAKL Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024

(4/9 - 15/9) Menindaklanjuti Surat Bersama Menteri Keuangan RI Nomor: S-626/MK.02/2023 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor: B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 serta Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA.2024 dan persiapan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Inspektorat bersama Biro PKH melakukan Reviu RKAKL Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024 terhadap seluruh unit kerja. Dalam melakukan Reviu RKAKL, Inspektorat mengacu pada PMK 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan PMK 49/2023 tentang Standar Biaya Masukan TA 2024.

### Entry Meeting Audit Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2023

(18/9) Salah satu tahapan dalam audit adalah melakukan *entry meeting* dengan auditi dalam hal ini adalah Pusat PPKS. Dalam *entry meeting* dijelaskan bahwa tujuan audit adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan PNBP telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan. Ruang lingkup Audit terkait PNBP meliputi pengelolaan PNBP pada tahap pelaksanaan yang bersumber dari layanan diklat, layanan jasa dan layanan produk IG.

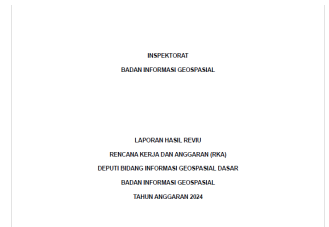
## OKTOBER

### Public Campaign Anti Gratifikasi

(17/10) Rangkaian Peringatan Hari Informasi Geospasial (HIG) 2023, BIG menggelar Public Campaign Anti Gratifikasi dengan menggandeng narasumber Penyuluh Anti Korupsi yaitu Luthfia Zein Pettarani. Beliau menyampaikan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap jika berkaitan dengan jabatannya. Tindakan gratifikasi yang sudah menjadi kebiasaan akan memicu tindakan korupsi lainnya seperti penyuaipan dan pemerasan. Maka untuk mencegah tindakan korupsi yang paling penting adalah integritas dari masing-masing personil.

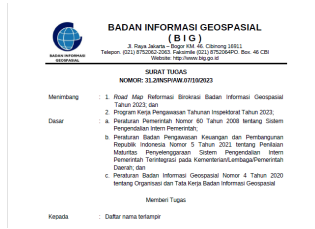
### Workshop Audit Kinerja

(24/10) Kegiatan workshop diikuti peserta dari perwakilan unit kerja BIG, KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan ANRI. Workshop bertujuan untuk memberikan pemahaman dan sharing session terkait audit kinerja. Dalam sambutannya, Plt. Sekretaris Utama, Antonius Bambang Wijanarto, menyampaikan untuk mencapai kinerja terdapat risiko yang dihadapi sehingga perlu manajemen risiko yang baik. Beliau berharap para narasumber dapat berbagi pengalaman dalam audit kinerja, apabila timbul masalah bagaimana langkah yang harus ditempuh, dan siapa saja yang harus terlibat.



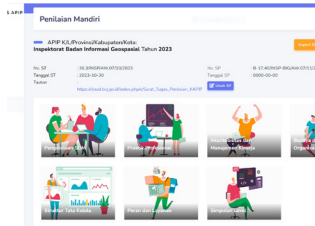
## NOVEMBER

## Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP



(1/11 – 30/11) Berdasarkan Peraturan BPKP Nomro 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa ruang lingkup penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di antaranya penilaian mandiri oleh manajemen K/L dan penjaminan kualitas oleh APIP K/L. Penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.

## Penilaian Kapabilitas APIP



(1/11 – 17/11) Kapabilitas dan efektivitas APIP dianggap sebagai 2 indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk mengukur efektivitas dan kapabilitas APIP, diperlukan suatu prosedur dan mekanisme yang diterima umum sehingga terdapat standar kualifikasi profesional dan karakteristik APIP yang kapabel dan efektif di organisasi sektor publik di Indonesia. Pada tahun 2023, Inspektorat BIG melakukan pengisian untuk penilaian kapabilitas APIP secara online melalui website yang disediakan oleh BPKP yaitu <https://apip.bpkp.go.id/newpkapip/login>.

## Pengawasan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Asia Pasific Geospatial Forum (APGF) di Bali



(6/11) APGF merupakan salah satu sarana bagi para pelaku dan pengguna informasi geospasial untuk bertemu dan berbagi pengalaman, keterampilan, inovasi, dan arah masa depan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk berkolaborasi dengan UNGIM-AP, UNGEGN, UNSD, dan lainnya untuk mengelaborasi perkembangan informasi geospasial secara global. Kegiatan APGF mulai dari *Opening Remarks* hingga *Bhumandala Award* berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan yang mengganggu jalannya pelaksanaan APGF. Seluruh stakeholder telah mendukung lancarnya jalannya acara ini.

## Practical and Experience Sharing in Managing Large Scale Topographic Maps Project and Related Thematic Maps for Spatial Planning



(19/11 - 24/11) BIG melalui perwakilan Inspektorat bersama Kepala Pusat Standardisasi Kelembagaan dan Informasi Geospasial melakukan pertemuan dalam rangka sharing pengetahuan dan pengalaman dalam pemetaan dasar, pemetaan tematik, dan analisisnya yang meliputi teknik akuisisi data, pengolahan, pemetaan, analisa, standar, sumber daya manusia, penganggaran, pengelolaan pekerjaan, pengelolaan data dan penyebarluasannya, serta output dan outcomenya di Bangkok, Thailand. Selama di Thailand, BIG Melakukan pertemuan dengan *The Department of Public Works and Town and Country Planning*, *Space Inspirium* dan Laboratorium Pengolahan Data Citra Satelit GISTDA (*Geo Informatics and Space Technology Development Agency*), Chulalongkorn University, dan GIS Co Ltd.

## Pendampingan Pemeriksaan Fisik Kinerja Terinci BPK-RI di Aceh dan Sulawesi Utara



(27/11 - 4/12) Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Peta Dasar dan Infrastruktur Informasi Geospasial Pendukung yang Berkualitas dan Siap Pakai dalam Rangka Mendukung Ketersediaan Akses dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Nasional Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2023. Tim BPK-RI melakukan konfirmasi terkait pemanfaatan peta yang telah dibuat oleh BIG khususnya terkait RTRW/RDTR dan batas desa/kelurahan. Target dari pemeriksaan fisik ini adalah dinas terkait yang berada di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh beserta gampong dan Pemerintah Kota Manado beserta desa/kelurahannya.

## Workshop dan Brainstorming Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan BIG



(27/11) Dalam rangka meningkatkan kinerja yang transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan negara, perlu adanya SPIP. SPIP bukan hanya sekadar pengendalian intern, namun juga mencakup proses tata kelola dan manajemen risiko. Manajemen risiko diawali dengan identifikasi risiko. Proses ini sangat penting agar dapat mengetahui risiko apa saja yang dapat menghambat tujuan instansi pemerintah. Untuk dapat menciptakan dokumen identifikasi risiko yang baik dan dalam tingkat strategis, Inspektorat BIG menyelenggarakan workshop dan brainstorming SPIP bersama narasumber dari BPKP.

## DESEMBER

### Exit Meeting Audit Kinerja Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan dan Pembinaan Simpul Jaringan - Pusat SKIG

(21/12) Tim Audit Kinerja Inspektorat BIG bersama auditi (Pusat SKIG) melakukan *Exit Meeting* Audit Kinerja Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan dan Pembinaan Simpul Jaringan yang merupakan tahapan dalam pelaksanaan audit. Inspektur dalam sambutannya pada rapat *exit meeting* audit kinerja menyampaikan bahwa audit kinerja merupakan serangkaian persiapan untuk kegiatan telaah seawat di tahun depan (2024). Audit kinerja bertujuan dimana APiP dapat melihat efisiensi, efektivitas dan ekonomis antara program-program yang ada.



### Exit Meeting Pemeriksaan Terinci Kinerja oleh BPK-RI

(27/12) Bertindak sebagai pimpinan rapat yaitu Ibu Belinda Arunarwati Margono selaku Sekretaris Utama BIG, beliau menyampaikan dalam arahannya bahwa Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas. Penyediaan peta skala besar yang menjadi tugas utama BIG menjadi PR besar sekaligus tantangan beberapa tahun kedepan. Masalah anggaran, pilihan teknologi yang terus berkembang, infrastruktur IG, dan SDM berkualitas membutuhkan kolaborasi multipihak dan komitmen pemerintah sehingga penyediaan peta dasar skala besar (selain skala menengah tentunya) dapat menunjukkan kemanfaatannya sebagai referensi spasial dalam mengawal implementasi pembangunan nasional. Berharap nanti terkait hasil pemeriksaan ini akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang berguna bagi peningkatan kinerja BIG dengan tetap mematuhi prinsip 3E dalam pelaksanaan kegiatan dan program.

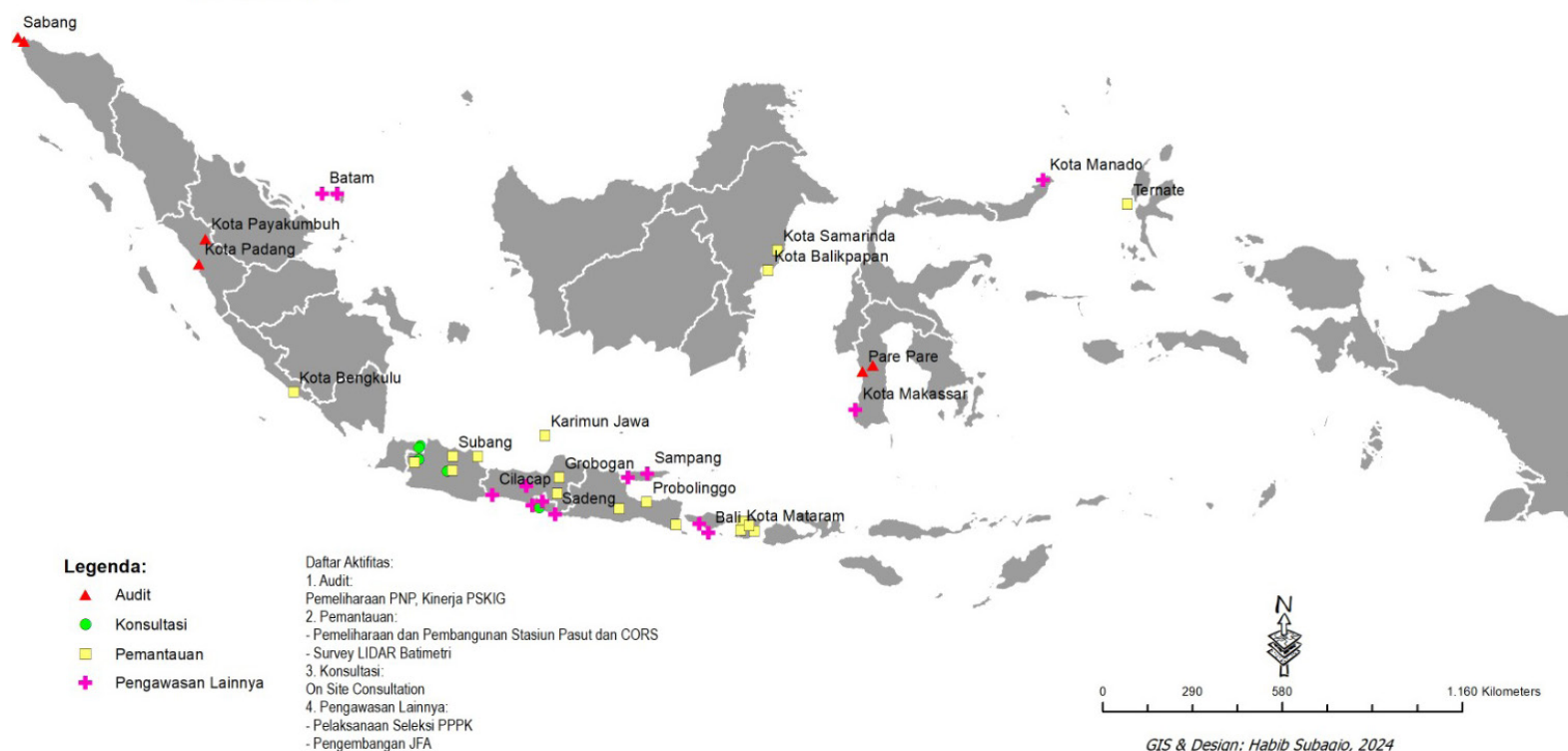


### Refleksi Inspektorat atas Pencapaian Kinerja Tahun 2023

(29/12) Pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2023 dapat memenuhi target keseluruhan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Refleksi dilaksanakan dengan acara yang santai. Diharapkan kinerja Inspektorat pada Tahun 2024 bisa meningkat dan terus menjadi mitra strategis bagi unit kerja.



## PETA DISTRIBUSI KEGIATAN INSPEKTORAT BIG 2023





A close-up photograph of a hand in a dark brown sweater holding a hand in a light grey sweater. The background is a wooden desk with a laptop, papers, and charts. A green vertical bar is on the right side of the image.

3

---

**PROFIL**

---

---

## TUGAS & FUNGSI INSPEKTORAT

---

### TUGAS

Sesuai Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, Inspektorat BIG memiliki tugas untuk



---

***Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Badan Informasi Geospasial***

---

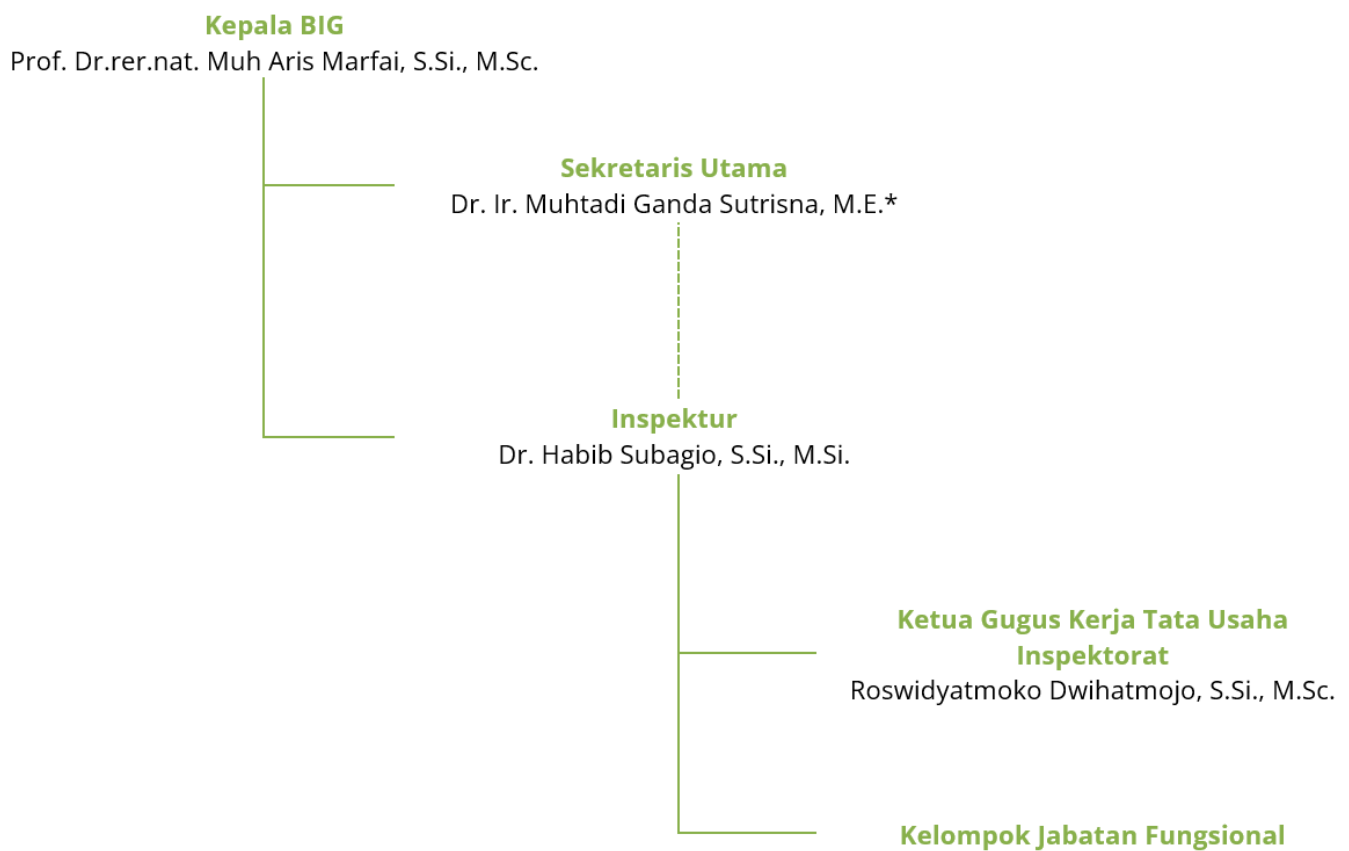
### FUNGSI

- Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BIG
- Penyusunan laporan hasil pengawasan
- Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG

---

# STRUKTUR ORGANISASI

---



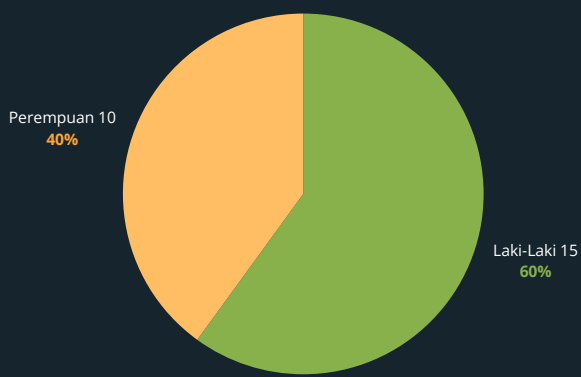
Inspektorat berkedudukan di bawah Kepala BIG dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG melalui Sekretaris Utama (Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2023)

\*Sekretaris Utama dijabat oleh:

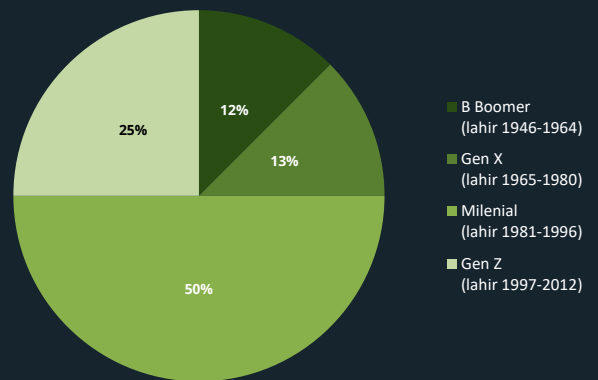
1. Dr.Ir. Muhtadi Ganda Sutrisna, M.E. mulai 5 Oktober 2018 s.d 30 Juni 2023
2. Dr. Antonius Bambang Wijanarto sebagai Plt. mulai 3 Juli 2023 s.d 7 Desember 2023
3. Dr.Ir. RA Belinda Arunarwati Margono, M.Sc. mulai 8 Desember 2023 s.d sekarang

# TIM & PERSONIL INSPEKTORAT

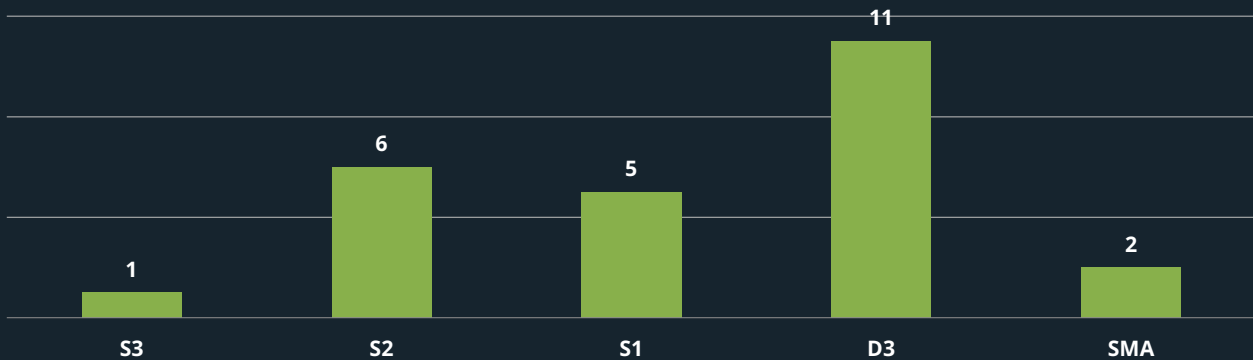
### STATISTIK JENIS KELAMIN



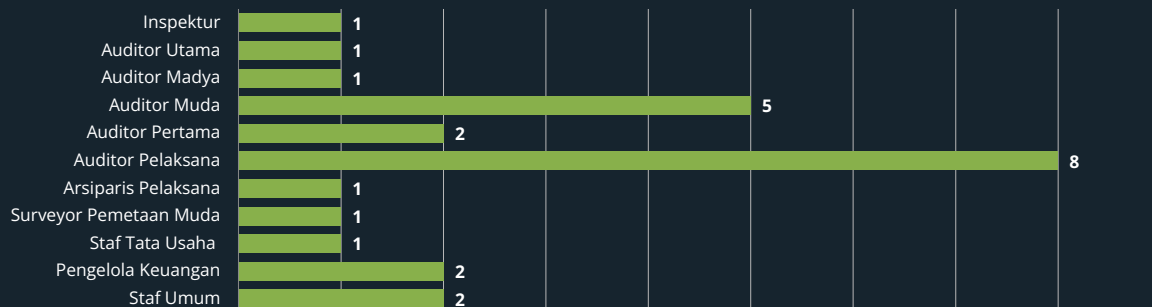
### STATISTIK KELOMPOK UMUR/GENERASI




### STATISTIK PENDIDIKAN



### STATISTIK JABATAN








**DR. HABIB SUBAGIO, S.SI, M.SI.**  
Inspektur



**ROSWIDYATMOKO D.**  
Ketua Gugus Kerja Tata Usaha



**NOVIANTO**  
Auditor Utama



**CECEP HAMDANI**  
Auditor Madya



**ARY PRASETYA**  
Auditor Muda



**ROCHIYATUN**  
Auditor Muda



**FEBRIAN SABBARENO**  
Auditor Muda



**YOYOH MAESAROH**  
Auditor Muda



**DINO EKA PUTRA**  
Auditor Muda




**ERNING DITTA D.S.**  
Auditor Pertama



**IQROMATUL FADLIYAH**  
Auditor Pertama



**AL-IQBAL FATIHA B.J.**  
Auditor Pelaksana



**LEROY MABEL G.**  
Auditor Pelaksana



**RAFLI DWI P.M.**  
Auditor Pelaksana



**ELFARIZKI NAUFAL A.**  
Auditor Pelaksana



**DEDE SETIADI**  
Auditor Pelaksana



**DITA CHRISTY**  
Auditor Pelaksana



**DIAN AYU WARDANI**  
Auditor Pelaksana



**IRBA ZAHRA S.**  
Auditor Pelaksana



**WINDA PUNGKI**  
Arsiparis Pelaksana



**LALA SURYANI**  
Arsiparis Penyelia




**DANIH**  
Fungsional Umum



**DWI ANNISA**  
Staf Tata Usaha



**YUDI WAHYUDI NUR**  
Staf Umum



**BAHRUDIN**  
Staf Umum



A hand is holding a tablet computer. In the background, there is a white keyboard and a notebook with a green pen. The scene is dimly lit, with a green square in the top right corner.

4

---

# CAPAIAN KINERJA

---



# AUDIT

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sepanjang Tahun Anggaran 2023, Inspektorat telah melakukan 3 kegiatan audit yaitu

1. Audit Kinerja,
2. Audit Pengelolaan PNBPN, dan
3. Audit Operasional.

## AUDIT KINERJA

11 - 24 Agustus 2023

### Perencanaan

Proses Perencanaan Audit dengan melakukan penerbitan Surat Tugas, Surat Pengantar Audit, dan Nota Dinas Permintaan Data.

28 Agustus - 8 September 2023

### Survei pendahuluan dan Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern

Pelaksanaan Rapat Survei Pendahuluan atas seluruh kegiatan layanan PSKIG dan Rapat Evaluasi SPI untuk mendapatkan gambaran (informasi) umum mengenai auditi dan menetapkan tujuan audit sementara untuk menentukan arah tahap audit selanjutnya.

8 September - 26 November 2023

### Pelaksanaan Audit Kinerja

Penyusunan Penyusunan Program Kerja Audit (PKA), Pembicaraan pendahuluan dengan auditi, Pengumpulan dan pengujian bukti, dan Penyusunan Kertas Kerja Audit (KKA)

27 - 30 November 2023

### Pelaporan

Laporan Audit Kinerja Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan dan Pembinaan Simpul Jaringan telah diterbitkan dengan nomor 30.1/INSP/AW.03/11/2023 tanggal 30 November 2023 yang berisi pengungkapan kondisi capaian kinerja dan kelemahan atas aspek keekonomisan, efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Audit kinerja di Badan Informasi Geospasial (BIG) mengacu pada PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang kemudian menjadi salah satu dasar penyusunan Pedoman Audit Kinerja di Inspektorat BIG yang disusun pada tahun 2023 dalam bentuk Nota Dinas Inspektur Nomor B-27.1/INSP/AW.03/7/2023 tanggal 27 Juli 2023 untuk menjaga mutu hasil audit dan keseragaman dalam pelaksanaan audit kinerja.

Pelaksanaan audit kinerja tahun 2023 selain untuk memenuhi Program Pengawasan Kinerja Tahunan (PKPT) Inspektorat tahun 2023 juga untuk mendukung bahan pelaksanaan kegiatan Telaah Sejawat Eksternal APIP BIG yang direncanakan akan dilakukan pada tahun 2024

### Rekomendasi

1. Saran bagi PPK Pusat SKIG agar memastikan kegiatan telah didukung oleh alokasi anggaran dan diharapkan agar menetapkan tanggung jawab yang jelas secara formal kepada para pegawai, terhadap pencapaian target yang sudah ditetapkan.
2. Agar melakukan monitoring dan evaluasi setiap target secara berkala atas kegiatan pembinaan simpul jaringan optimal dan penyusunan rencana perbaikan, serta melakukan reuiu atas indikator kinerja Indeks kelembagaan simpul jaringan yang optimal.
3. Agar segera melaksanakan pengesahan peraturan terkait simpul jaringan informasi geospasial serta menyusun aturan percepatan Simpul Jaringan (SJ) dan pengukuran hasil kinerja kegiatan percepatan.

## AUDIT PNBP

4 - 18 September 2023

### Persiapan

- Penerbitan surat tugas
- Permintaan data dan dokumen sebagai bahan pelaksanaan audit
- Entry meeting audit pengelolaan PNBP

19 September - 10 November 2023

### Pelaksanaan

- Penyusunan Program Kerja Audit
- Penyusunan Kertas Kerja Audit
- Pengecekan dan pengujian bukti dokumen
- Konfirmasi lapangan ke Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Sumatera Barat
- Ekspos Proses Bisnis dan Mekanisme Pembayaran PNBP

18 - 29 Desember 2023

### Pelaporan

- Penerbitan Notisi Audit PNBP 2023
- Penerbitan laporan Hasil Audit atas PNBP BIG Tahun 2023 Nomor 29.4/INSP/AW.03/12/2023

APIP BIG melaksanakan Audit atas PNBP Tahun 2023 berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 dan Surat Tugas Inspektur Nomor 4.4/INSP/AW.03/9/2023 tanggal 4 September 2023.

Audit dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan PNBP telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan.

### Rekomendasi

1. Seluruh dokumen pendukung kegiatan Kerjasama didokumentasikan dan ditatausahakan dengan tertib.
2. Mereviu SOP terkait Layanan Perencanaan Kerjasama.
3. Menambahkan klausul terkait sanksi dalam SSKK Kontrak Kerjasama Swakelola Tipe II ke depannya.
4. Melakukan pengawasan kontrak dengan lebih baik.

## AUDIT PPIG

12 - 22 Juni 2023

### Persiapan

- Penerbitan surat tugas
- Entry meeting

23 Juni - 22 Agustus 2023

### Pelaksanaan

- Penyusunan PKA
- Melakukan pengujian terhadap dokumen
- Pembahasan temuan sementara
- Notisi audit (R-28.2/INSP/AW.03/7/2023)
- Exit meeting

31 Agustus 2023

### Pelaporan

- Penerbitan LHA (31.3/INSP/AW.03/8/2023)

Audit Pekerjaan *Maintenance Support* Fasilitas DC dan *Maintenance Support DC Analog* pada Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pekerjaan *Maintenance Support Data Center* pada Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG) telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan (KAK dan HPS), didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang baik, dilaksanakan secara tertib sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan tidak ada tindak penyimpangan dalam pelaksanaannya.

### Rekomendasi

1. Kecermatan dalam melakukan perubahan kontrak dan penyusunan dokumen addendum kontrak
2. Pemilihan jenis kontrak pengadaan barang/jasa yang tepat
3. Pengendalian dan pengawasan kontrak yang lebih baik





## REVIU

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan

Sepanjang tahun 2023, secara umum Inspektorat telah melaksanakan 17 kegiatan reviu dengan tujuh tema reviu yaitu:

1. Reviu Laporan Keuangan BIG
2. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
3. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja
4. Reviu Tunjangan Kinerja
5. Reviu Revisi DIPA/DJA
6. Reviu Penyusunan RKA-K/L
7. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK - BMN)

### REVIU LAPORAN KEUANGAN

Reviu laporan keuangan BIG dilaksanakan selama dua kali dalam tahun 2023, yaitu Reviu Laporan Keuangan BIG Tahun 2022 yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Maret 2023 dan Reviu Laporan Keuangan BIG Semester I Tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan Juli s.d. September 2023. Reviu dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan BIG.

Ruang lingkup reviu mencakup penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BIG, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada UAPPA-E1 dan UAKPA, tapi tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan.

### REVIU PIPK

Reviu PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) dilaksanakan selama satu kali dalam tahun 2023 pada bulan Januari s.d. Maret 2023 bersamaan dengan penyusunan Laporan Keuangan BIG tahun 2022. Reviu PIPK dilaksanakan untuk memastikan penilaian PIPK dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Reviu PIPK dilaksanakan dengan adanya identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian, perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya, pengujian pengendalian intern tingkat entitas, pengujian pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi, pengujian atribut pengendalian, pengujian pengendalian aplikasi, penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan pengendalian, dan penilaian kelemahan gabungan.

### REVIU LAPORAN KINERJA

Reviu laporan kinerja dilaksanakan selama satu kali dalam tahun 2023 pada bulan Februari s.d. Maret 2023. Reviu dilakukan untuk memastikan laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas. Reviu bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas

## REVIU TUNJANGAN KINERJA

Reviu tunjangan kinerja dilaksanakan selama empat kali dalam tahun 2023. Reviu tunjangan kinerja dilakukan dengan tujuan untuk membantu terlaksananya pemberian tunjangan kinerja yang tepat dan memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa pelaksanaan tunjangan kinerja telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Reviu dilaksanakan terhadap kesesuaian kelas jabatan dan ketepatan perhitungan tunjangan kinerja berdasarkan penilaian kinerja dan jumlah kehadiran serta pemotongan lainnya. Reviu dilaksanakan setelah pembayaran tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai. Informasi dan nilai yang ditelusuri dalam reviu tunjangan kinerja meliputi:

1. Penelusuran kelas jabatan ke surat keputusan/satminkal/ dokumen lainnya,
2. Perhitungan ulang kertas kerja manual tunjangan kinerja reviu tunjangan, dan;
3. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, perhitungan dan pembayaran tunjangan kinerja.

## REVIU REVISI DIPA DJA

Revisi anggaran BIG dilaksanakan sebanyak 17 kali dengan rincian enam revisi DIPA DJA beserta revisi *automatic adjustment*, tujuh revisi DIPA kanwil, dan empat revisi POK KPA. Reviu revisi DIPA DJA dilaksanakan selama enam kali dalam tahun 2023 sesuai dengan jumlah revisi DIPA DJA pada tahun 2023.

Inspektorat hanya mereviu revisi anggaran yang berkaitan dengan

- Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah;
- Pergeseran anggaran antar-program kecuali dalam rangka pemenuhan belanja operasional;
- Revisi anggaran dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi kementerian/ lembaga; dan/atau
- Revisi anggaran dalam hal terdapat program/kegiatan/KRO/RO baru

## REVIU PENYUSUNAN RKA-K/L

Reviu Penyusunan RKA-K/L dilaksanakan selama dua kali dalam tahun 2023, yaitu pada saat penyusunan pagu anggaran yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dan pada saat penyusunan pagu alokasi anggaran yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2023. Ruang lingkup reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L unit eselon I dan dokumen sumber yang dilakukan secara terbatas pada *Term of Reference* (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), serta dokumen pendukung terkait lainnya.

Reviu RKA-K/L bertujuan untuk membantu terlaksananya penyusunan RKA-K/L dan memberi keyakinan terbatas bahwa informasi dalam RKA-K/L telah disusun berdasarkan Pagu dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renja K/L, RKP, standar biaya, Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), dan kebijakan ekonomis, efisiensi, efektivitas anggaran.

## REVIU RK-BMN

Reviu RK-BMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) dilaksanakan pada bulan Oktober 2023. Reviu dilaksanakan setelah proses penyusunan RK-BMN oleh Pengguna Barang atau sebelum disampaikan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RK-BMN dengan ketentuan penyusunan RK-BMN yang berlaku dan untuk membantu terlaksananya dokumen RK-BMN.

Ruang lingkup reviu RK-BMN terdiri dari rencana kebutuhan BMN atas

- Pengadaan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan gedung kantor/ rumah negara serta pengadaan BMN maupun selain tanah dan/atau bangunan yang sudah mempunyai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), dan;
- Pemeliharaan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan gedung kantor/rumah negara, alat angkutan bermotor, dan selain alat angkutan bermotor





## EVALUASI

Evaluasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan kinerja serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2023, Inspektorat melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi AKIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

**Evaluasi AKIP** merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan evaluasi AKIP ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada unit kerja.

### TUJUAN

1. Memperoleh informasi tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada unit kerja;
2. Menilai tingkat implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada unit kerja;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja pada unit kerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada unit kerja
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi unit kerja pada periode sebelumnya pada unit kerja

### MEKANISME

1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data
2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan LHE
3. Reviu Rancangan LHE Akuntabilitas Kinerja
4. Pengendalian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
5. Pelaporan dan Pengomunikasian LHE Akuntabilitas Kinerja
6. Pemantauan Berkelanjutan



## PENILAIAN INTERNAL **EVALUASI AKIP 2023 ESELON I**

Pada tahun 2023, seluruh Eselon I telah tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebelum tanggal 15 Februari 2023 sesuai dengan Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Badan Informasi Geospasial. Selanjutnya, Inspektorat melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat dalam pasal 5 Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021. PermenPANRB tersebut mengatur bahwa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) harus memperhatikan beberapa variabel, antara lain:

1. **Komponen**  
Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Internal
2. **Sub-komponen**  
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan pada setiap komponen
3. **Kriteria**  
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

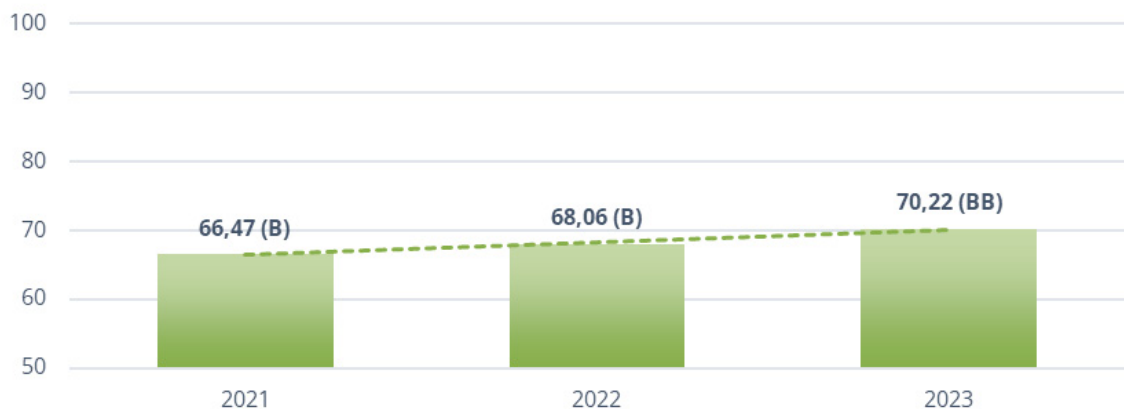
Evaluasi dilakukan kepada empat kedeputian yang ada di BIG dengan hasil :

<b>Aspek Penilaian</b>	<b>Settama</b>	<b>IGD</b>	<b>IGT</b>	<b>IIG</b>
Perencanaan Kinerja	24,90	24,60	25,20	25,50
Pengukuran Kinerja	24,60	26,70	26,70	27,60
Pelaporan Kinerja	9,75	6,00	11,10	12,60
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal	20,20	17,50	15,90	13,90
<b>Total Nilai</b>	<b>79,45</b>	<b>74,80</b>	<b>78,90</b>	<b>79,60</b>
<b>Predikat</b>	<b>(BB)</b>	<b>(BB)</b>	<b>(BB)</b>	<b>(BB)</b>

## HASIL EVALUASI **AKIP BIG OLEH KEMENTERIAN PAN-RB**

Pada tahun 2023, Kementerian PANRB juga melakukan Evaluasi AKIP tahun 2023 terhadap Badan Informasi Geospasial. Hasil dari evaluasi ini telah diberikan melalui surat kepada Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Nomor B/90/AA.05/2023.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Informasi Geospasial mendapatkan nilai sebesar 70,22 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada Lembaga dan Sebagian unit kerja, ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.





## PEMANTAUAN

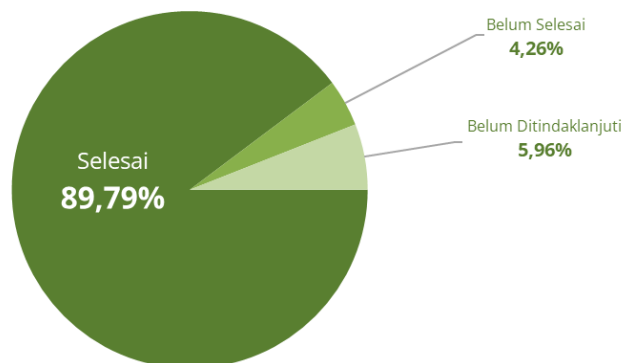
Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sepanjang Tahun Anggaran 2023, Inspektorat telah melakukan 2 kegiatan pemantauan yaitu:

1. Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI, dan
2. Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat.

### PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT

Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Semester II Tahun 2023 Nomor 29.7/ INSP/AW.03/12/2023 tanggal 29 Desember 2023, status tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat s.d. Semester II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

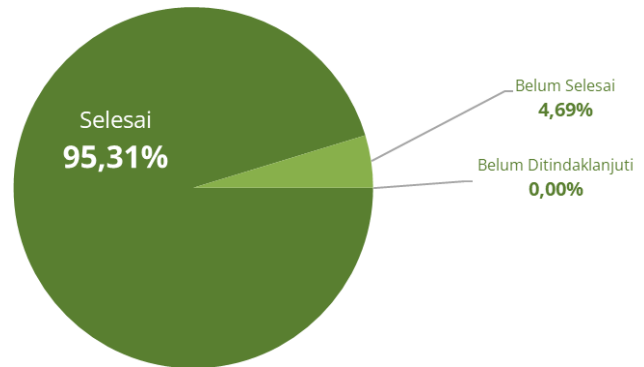


Tahun	Rekomendasi	Selesai	Belum Selesai	Belum Ditindaklanjuti
2023	235	211	10	14

## PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2023 Nomor 22.2/INSP/AW.06/12/2023 tanggal 22 Desember 2023, status tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di BIG adalah sebagai berikut:

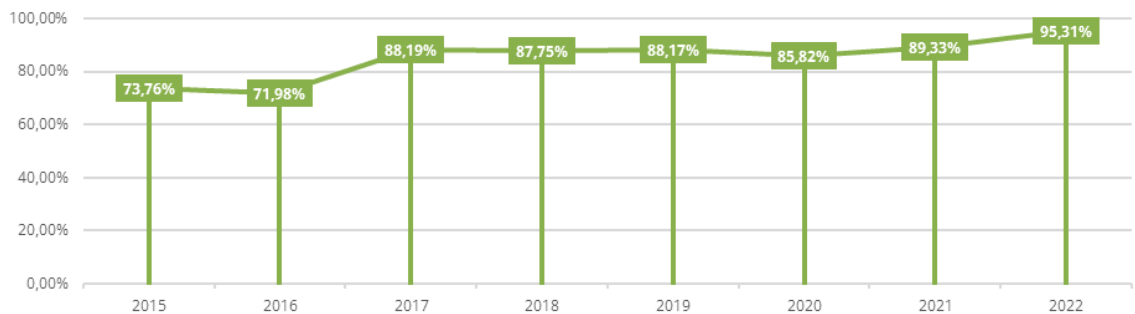
Tahun	Rekomendasi	Selesai	Belum Selesai	Belum Ditindaklanjuti
2022	448	427	21	0



Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Tim Pemantau Tindak Lanjut BIG untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk penyelesaian temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK khususnya yang terkait dengan temuan aset tetap dan aset tak berwujud yang menjadi temuan berulang 2 tahun berturut-turut;
- Menyiapkan data dukung dan kronologis temuan, khususnya yang terkait dengan temuan pemeriksaan BPK dengan rekomendasi pengembalian atau penyetoran ke Kas Negara beserta dengan data tindak lanjut penyetoran per unit kerja dan per nama Penyedia Barang/Jasa terkait sehingga memudahkan unit kerja dalam melakukan proses tindak lanjut;
- Menghubungi dan mendatangi pihak-pihak yang terkait dengan temuan pemeriksaan BPK dengan rekomendasi untuk pengembalian atau penyetoran ke Kas Negara agar dapat segera menindaklanjuti dan menyampaikan bukti setor ke Kas Negara kepada Inspektorat; dan
- Melakukan kajian dan konsultasi kepada instansi yang terkait (Kementerian Keuangan dan BPK) atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang sulit untuk ditindaklanjuti, termasuk dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diikuti oleh unit terkait di lingkungan BIG, sehingga atas rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat diperoleh solusi penyelesaian dan dapat diusulkan status tindak lanjutnya menjadi "tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah" kepada BPK.

## TREN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI



Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI menunjukkan tren yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Rincian penyelesaian rekomendasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahun	Rekomendasi	Selesai	Persentase
2015	221	163	73,76 %
2016	257	185	71,98 %
2017	288	254	88,19 %
2018	302	265	87,75 %
2019	389	343	88,17 %
2020	409	351	85,82 %
2021	431	385	89,33 %
2022	448	425	95,31 %



## PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

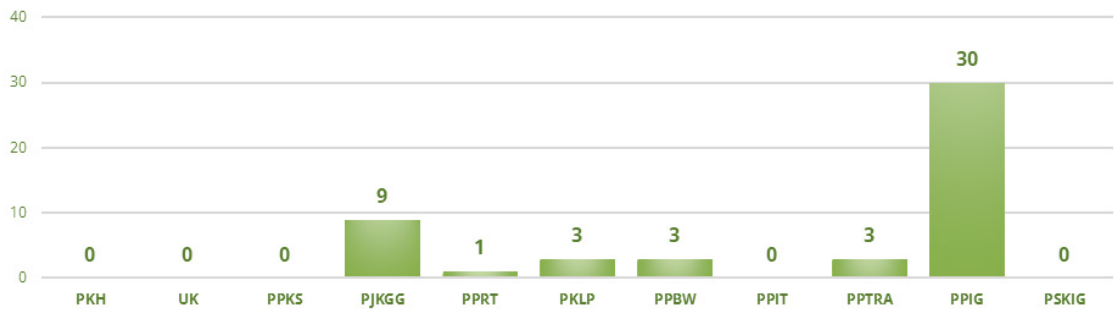


Kegiatan pengawasan lainnya di Inspektorat selama tahun 2023 yaitu:

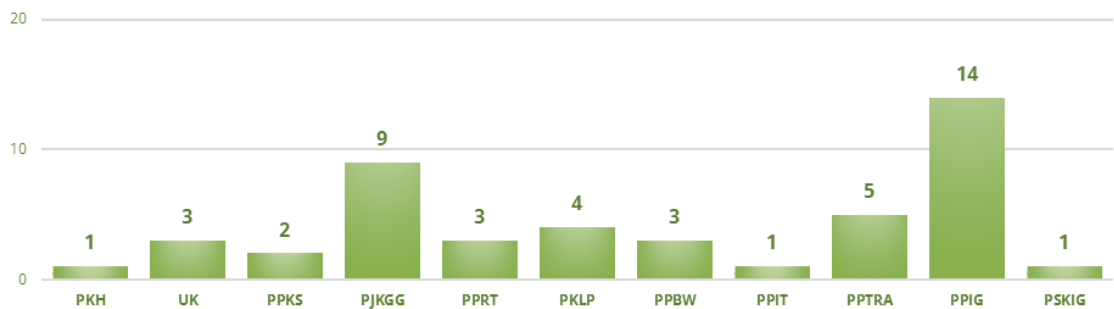
1. Kegiatan Asistensi, Fasilitasi, dan Konsultasi
2. Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
3. Pelatihan Penguatan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
4. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
5. Telaah Sejawat
6. Pengendalian Gratifikasi
7. Penanganan dan Pengelolaan Aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS) dan Pengaduan Masyarakat (Dumas)
8. Pembangunan Zona Integritas (ZI)
9. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
10. Pencegahan Benturan Kepentingan (BK)
11. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi (RB)

## KEGIATAN ASISTENSI, FASILITASI, DAN KONSULTASI

**Asistensi** merupakan aktivitas mereviu draf KAK dan HPS yang telah disusun unit kerja dan memberikan rekomendasi. Selama tahun 2023, Inspektorat telah melakukan asistensi dengan unit kerja dengan ringkasan data jumlah draft KAK dan HPS yang direviu, yaitu sebagai berikut:



**Fasilitasi dan Konsultasi** merupakan kegiatan pendampingan mengikuti kegiatan *kick off meeting* pelaksanaan pekerjaan dan pendampingan pekerjaan unit di lapangan. Selain itu, Inspektorat juga melaksanakan fasilitasi melalui sosialisasi gratifikasi dan benturan kepentingan di PPRT. Selama tahun 2023, Inspektorat telah melakukan fasilitasi dan konsultasi dengan unit kerja dengan ringkasan data jumlah pekerjaan yang dilakukan pendampingan kickoff dan pendampingan di lapangan, yaitu sebagai berikut:



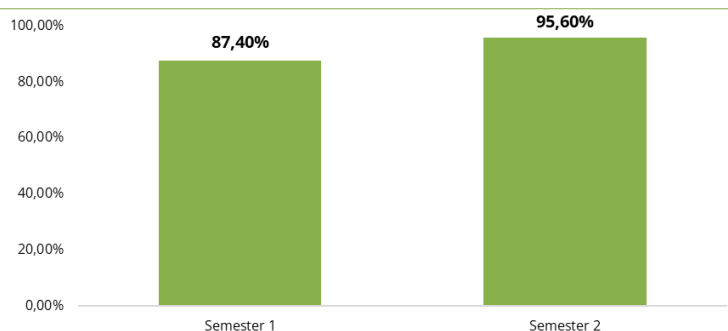
## PEMANTAUAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)

**Pelaporan LHKAN** oleh pegawai BIG saat ini terdiri dari pelaporan LHKPN dan pelaporan SPT Tahunan. Sebelum tahun 2023, pengawasan pelaporan LHKPN dilaksanakan pada Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum. Pada tahun 2023, pengawasan pelaporan LHKPN dilaksanakan oleh Inspektorat. Pada tahun 2023, pegawai BIG yang menjadi wajib lapor LHKPN berjumlah 52 orang. Tingkat pelaporan LHKPN mencapai 100% sudah melaporkan kewajibannya

### PELAPORAN LHKPN 2022



### PELAPORAN SPT TAHUNAN 2022



## PELATIHAN PENGUATAN JFA

**Penguatan JFA** adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan dilandasi kepribadian dan etika agar dapat melaksanakan tugas pengawasan secara profesional, efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

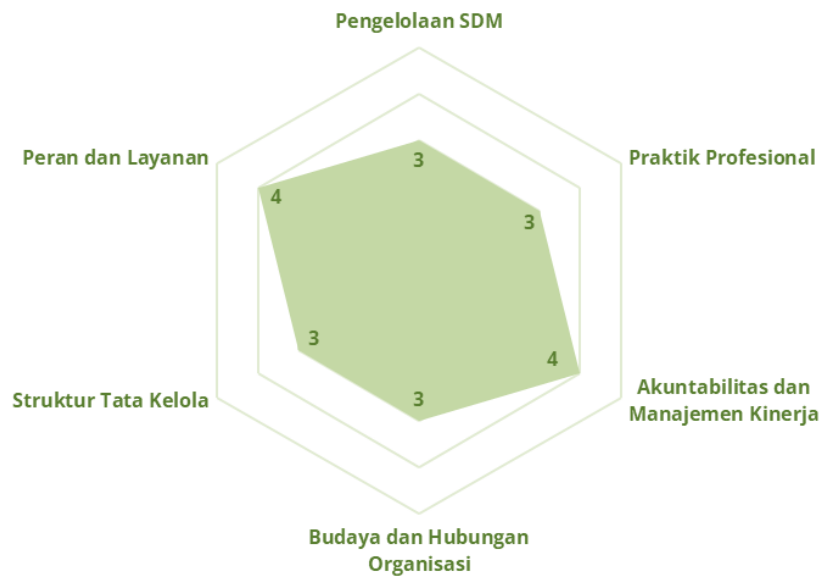
Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja di BIG, Auditor juga perlu meningkatkan bekal diri baik dalam hal kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan di bidang pengawasan internal. Hal ini dimaksudkan agar proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dapat semakin optimal bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Penguatan Jabatan Fungsional Auditor bertujuan untuk pengembangan karir dan profesi dalam jenjang kepangkatan dan jabatan auditor, sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jenjang jabatan auditor yang terdiri dari Auditor Pelaksana, Auditor Pertama, Auditor Muda, Auditor Madya, dan Auditor Utama.

Berikut ini beberapa diklat dan pelatihan yang diikuti oleh APIP BIG pada tahun 2023 yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara diklat seperti BPKP, Kemenkeu, IAI, dan beberapa penyelenggara diklat lainnya, yaitu:

No	Nama Diklat/ Sertifikasi/ Seminar dan Penyelenggara	Jumlah Peserta
1	Strategi Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintahan K/L/D SmartID	1 orang
2	Diklat Audit kinerja Pusdiklatwas BPKP	2 orang
3	Diklat dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kompetensi Level 1 Pusdiklatwas BPKP	1 orang
4	Bimbingan Teknis Pengawasan PNBPN bagi APIP K/L Kemenkeu - DJA	2 orang
5	Diklat Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pusdiklatwas BPKP	2 orang
6	Diklat <i>Certified Government Accounting Associate</i> (CGAA) Pusdiklatwas BPKP - IAI	4 orang
7	Strategi dan Metode Audit Kinerja untuk mendukung kualitas SAKIP SmartID	1 orang
8	Diklat dan Sertifikasi <i>Certified Data Science Practitioner</i> Pusdiklatwas BPKP	1 orang
9	Diklat Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusdiklatwas BPKP	2 orang
10	Seminar Nasional Auditor IIA	3 orang
11	Workshop Pemanfaatan <i>Digital Forensic</i> dan <i>Data Analytics</i> untuk mendukung kegiatan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah BPKP	1 orang
12	Diklat dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I PPM Management	1 orang

## PENGUATAN KAPABILITAS APIP

**Penguatan Kapabilitas APIP** dilaksanakan melalui Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dilaksanakan melalui aplikasi : <https://apip.bpkp.go.id/>. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2023 adalah sebesar **3,46** dengan level sebesar **3**. Hasil tersebut telah dikirimkan secara sistem kepada BPKP oleh admin instansi. Agar proses penilaian dapat dilaksanakan oleh BPKP, Inspektur BIG telah menyampaikan surat permohonan evaluasi atas hasil penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat BIG Tahun 2023 Nomor : B-17.4/INSP-BIG/AW.07/11/2023 tanggal 17 November 2023. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023 dapat dilihat pada bagan berikut.



## TELAAH SEJAWAT



**Telaah Sejawat** bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi serta memenuhi harapan pemangku kepentingan serta dapat mendorong percepatan peningkatan kapabilitas pengawasan intern APIP menuju *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* level 3. Pelaksanaan telaah sejawat dilakukan mengacu pada Pedoman Telaah Sejawat Ekstern APIP berdasarkan Keputusan Ketua Umum DPN AAPII Nomor KEP-43/AAPII/DPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang digunakan sebagai panduan bagi APIP dan Komite Telaah Sejawat AAPII dalam melaksanakan rangkaian kegiatan telaah sejawat ekstern antar-APIP serta memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan kualitas kegiatan pengawasan intern APIP.

Sebagian besar data dukung sudah disiapkan oleh Inspektorat BIG yang berguna untuk memenuhi kriteria kertas kerja pelaksanaan Telaah Sejawat. APIP BIG telah menyampaikan Surat Permohonan Telaah Sejawat Ekstern Nomor B-2.13/INSP-BIG/AW.07/11/2023 tanggal 2 November 2023. Rencana pelaksanaan telaah sejawat APIP BIG direncanakan akan dilakukan tahun 2024.

## PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Inspektorat sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Badan Informasi Geospasial telah melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi sebagai pelaksanaan tugas sesuai Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Badan Informasi Geospasial. Di tahun 2023, kegiatan yang dilakukan UPG BIG antara lain:

### SOSIALISASI GRATIFIKASI DI UNIT KERJA



Pada tanggal 27 Oktober 2023, Inspektorat menjadi narasumber dalam kegiatan Internalisasi Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan pada Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim yang dilaksanakan di Aula BIG. Pada kegiatan tersebut, disampaikan materi terkait pengertian dan bentuk gratifikasi, UPG, mekanisme pelaporan gratifikasi, penetapan status gratifikasi, serta gratifikasi dalam perspektif hukum.

### IKUT SERTA MENYEMARAKAN HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA (HAKORDIA)



Sebagai upaya kampanye bersama untuk mengajak pegawai BIG dan masyarakat umum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, UPG BIG ikut serta dalam menyemarakkan HAKORDIA pada 9 Desember 2023 dengan membagikan media terkait HAKORDIA di sosial media Inspektorat, spanduk, maupun website resmi BIG, serta mengikuti rangkaian acara HAKORDIA yang diadakan di Istora Senayan, Jakarta.

### PUBLIC CAMPAIGN GRATIFIKASI PADA PERINGATAN HIG



UPG BIG berkoordinasi dengan KPK dalam melaksanakan Kegiatan *Public Campaign* Gratifikasi di tahun ini. Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan Peringatan Hari Informasi Geospasial ke-54 dan diikuti oleh pegawai BIG dengan antusias. Penyampaian materi oleh Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Madya memberikan pemahaman dasar terkait dengan korupsi dan gratifikasi serta himbauan kepada seluruh peserta yang hadir untuk melaporkan gratifikasi yang diterima.

Selain *Public Campaign* Gratifikasi, dilaksanakan sosialisasi gratifikasi kepada pihak eksternal bersamaan dengan sosialisasi pengadaan informasi geospasial melalui E-Katalog. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari penyedia jasa informasi geospasial yang tergabung pada Asosiasi Perusahaan Survei dan Pemetaan Informasi Geospasial (APSPIG).

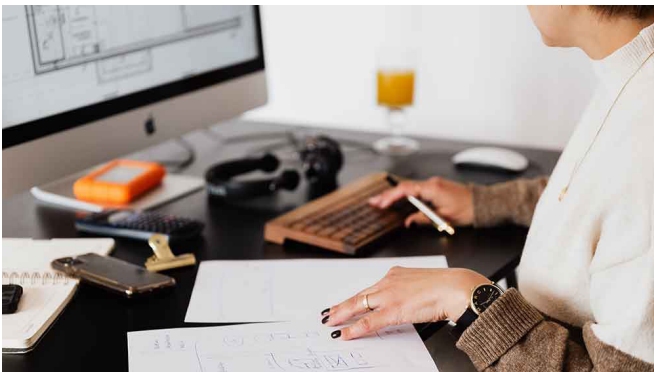


## MENDORONG IDENTIFIKASI RISIKO GRATIFIKASI DI SELURUH UNIT KERJA



Bersamaan dengan pendampingan dan diskusi penyusunan dokumen Identifikasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk rencana kegiatan tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 19-20 Desember 2023, UPG telah mendorong setiap unit kerja untuk mengidentifikasi risiko gratifikasi. Upaya ini dilakukan agar risiko gratifikasi yang belum terintegrasi dalam dokumen identifikasi risiko dan RTP unit kerja, dapat diidentifikasi dengan memadai.

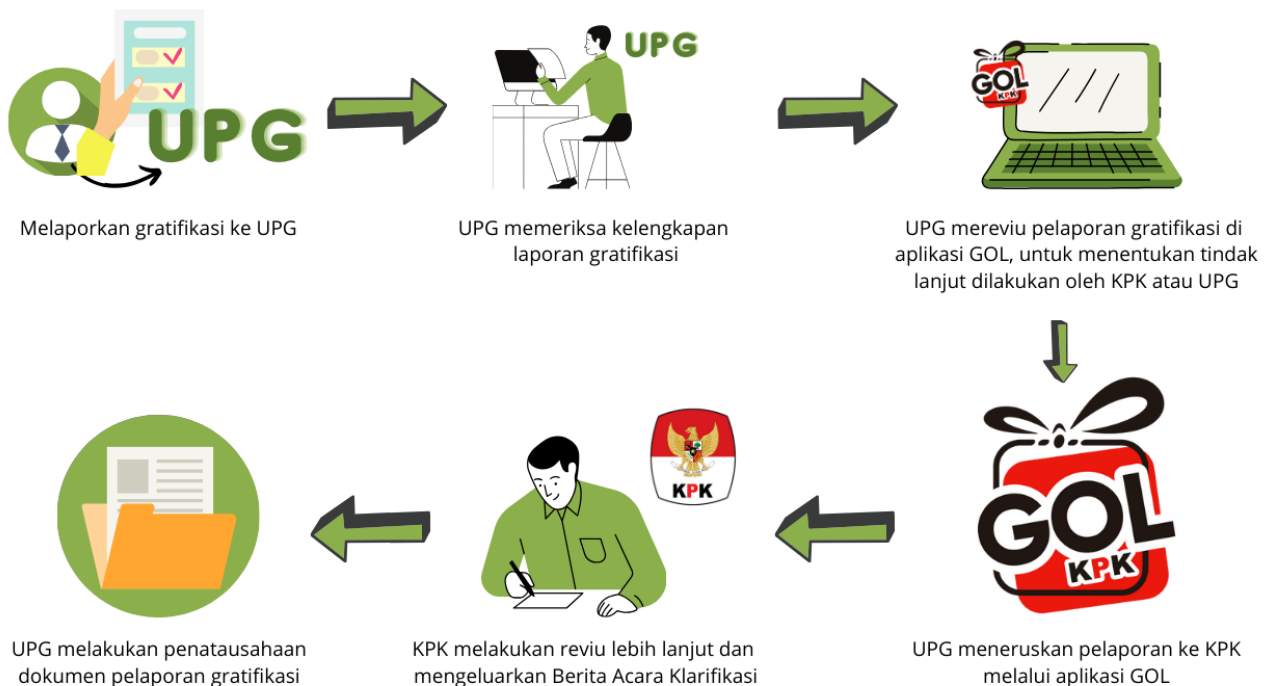
## MENGELOLA DAN MENINDAKLANJUTI PELAPORAN GRATIFIKASI



UPG BIG mengelola pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi melalui laporan yang dikelola instansi serta yang diteruskan ke KPK melalui aplikasi GOL.

Berdasarkan Laporan Pengendalian Gratifikasi yang disusun oleh UPG BIG, jumlah laporan gratifikasi di tahun 2023 sebanyak 1 laporan yang telah ditetapkan statusnya sebagai milik negara melalui keputusan KPK.

## MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

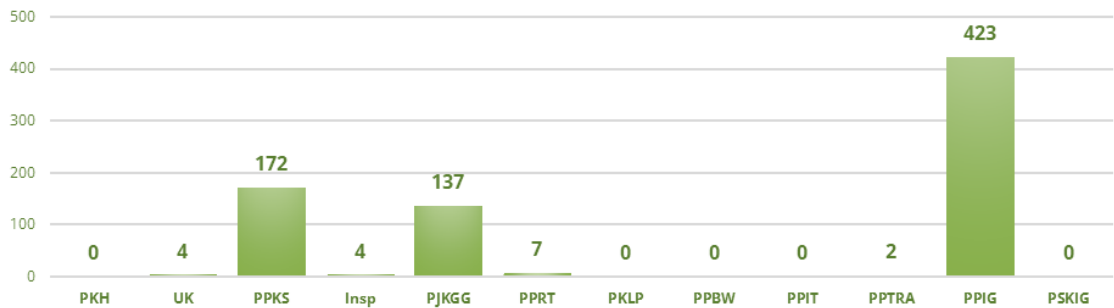


## PENANGANAN DAN PENGELOLAAN DUMAS & WBS

**Pengaduan masyarakat atau Dumas** adalah bentuk penerapan dari pengawasan yang disampaikan oleh ASN atau masyarakat kepada BIG, berupa sumbang pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun maupun informasi adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ASN yang mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara. Inspektorat berperan sebagai pelaksana pengelolaan dumas, dengan tugas antara lain memantau penyelesaian dumas, melakukan evaluasi pemantauan dumas, dan menyusun serta menyampaikan laporan dumas.

Pengelolaan Dumas dan WBS di Lingkungan BIG diatur dalam Peraturan Kepala BIG Nomor 6 Tahun 2016. Pada tahun ini, Inspektorat sedang menyusun naskah dinas perubahan peraturan tersebut untuk mengakomodasi perbaikan mekanisme pengaduan dan menyesuaikan dengan kebijakan baru.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat yang diterima oleh masing-masing unit kerja di BIG, jumlah dumas di tahun 2023 adalah sebanyak **749 laporan Dumas** yang seluruhnya berstatus telah ditindaklanjuti.

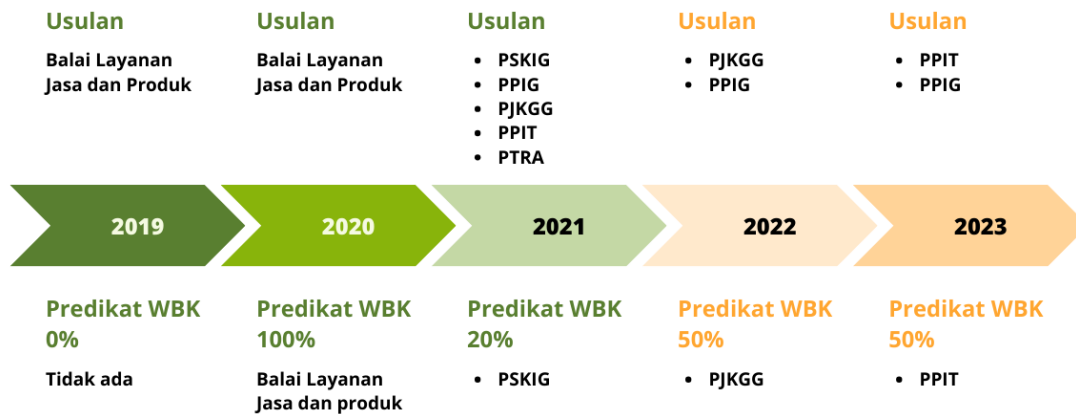


Pengaduan masyarakat dikelola melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-Lapor) oleh administrator dari Inspektorat dan pejabat penghubung di setiap unit sebagaimana ditetapkan dalam SK Kepala BIG Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan BIG. Pada tahun 2023, tidak terdapat laporan yang diterima melalui aplikasi SP4N-Lapor.



LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

## PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM



**4 April 2023**, Inspektorat melakukan tahapan permintaan Tanggapan untuk Usulan Penilaian Unit Kerja Menuju WBK Tahun 2023 Melalui Nota Dinas NOMOR: B-4.1/INSP/AW.07/3/2023 tanggal 4 April 2023 kepada Deputi IGT dan Deputi IIG.

**5 April 2023**, Inspektorat mengundang Peserta undangan calon WBK yang terdiri dari unit kerja yang tahun sebelumnya pernah mengajukan usulan calon unit kerja berpredikat WBK (PPIG, PPIT, dan PTRA) dan unit kerja yang belum pernah mengajukan usulan ZI WBK (Biro UK, Biro PKH, PPBW, PKLP, dan PPRT). Rapat ini untuk membahas terkait bagaimana pengajuan ZI WBK, pengusulannya seperti apa, dan survei penilaian mandiri berdasarkan Surat dari Menpan nomor B/23/PW.00/2023 terkait Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI.

**5 Mei 2023**, Dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dan Nota Dinas Inspektur Nomor B-3.1/INSP/AW.07/5/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Penyusunan Tim Penilai Unit Kerja Eselon I Pembangunan Zona Integritas, Inspektorat mengundang Unit PPIG dan PPIT pada kegiatan Persiapan Penilaian Pendahuluan Pembangunan Zona Integritas.

**29 Mei 2023**, Tim TPI BIG menyampaikan hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Informasi Geospasial sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/23/PW.00/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023.

**30 Mei 2023**, Kepala BIG menyampaikan Usulan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui surat nomor B-30.8/KA-BIG/AW.07/5/2023 dengan mengusulkan 2 pusat yaitu Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (Pusat PPIG) dan Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (Pusat PIT).

**3 Juli 2023**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan hasil penilaian TPN seleksi dari administrasi ZI dinyatakan bahwa 2 unit kerja BIG dinyatakan lulus seleksi.

**10 Agustus 2023**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan jadwal wawancara virtual terhadap unit/satuan kerja yang telah diusulkan oleh Badan Informasi Geospasial.

**28 November 2023**, Kementerian PANRB menyampaikan Undangan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 yang akan dilakukan Pada Tanggal 6 Desember 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center Kawasan Terpadu ITDC NW, Nusa Dua Bali yang berisi kegiatan penganugerahan predikat WBK pada Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik.

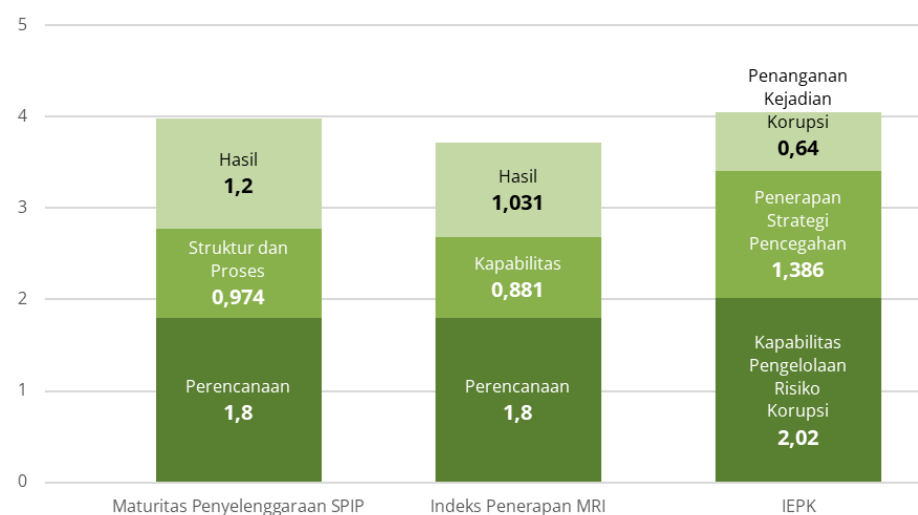


## PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI

**Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi** berpedoman pada Peraturan BPKP nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D). Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dilaksanakan melalui Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) oleh K/L/D dan kemudian dilanjutkan proses evaluasi oleh BPKP atas hasil PM yang telah dilakukan PK.

Tim PK seluruhnya merupakan personil dari APIP dengan syarat seluruh tim PK pernah mengikuti diklat/bimtek SPIP & penilaian SPIP dan/atau mengikuti penugasan terkait SPIP. Jumlah personil Tim PK telah mempertimbangkan kompleksitas satker, serta pemahaman atas proses bisnis satker mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Penugasan kepada Tim PK juga telah didukung dengan mandat yang disampaikan secara formal melalui Surat Tugas Inspektur Nomor 31.2/INSP/AW.07/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Tim Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Badan Informasi Geospasial Tahun 2023. Hasil penjaminan kualitas terhadap 3 (tiga) komponen penilaian yang telah dilakukan oleh tim PM menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Level	Skor
1	Penetapan Tujuan		1,800
2	Struktur dan Proses		0,974
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		1,200
<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>		<b>3</b>	<b>3,974</b>
<b>Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)</b>		<b>3</b>	<b>3,713</b>
<b>Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)</b>		<b>3</b>	<b>4,042</b>



Saran peningkatan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang harus diperbaiki secara umum pada tingkat terdefinisi yaitu mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya. Dengan dilaksanakannya proses penjaminan kualitas tersebut, tim PK telah mengeluarkan surat pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Informasi Geospasial Tahun 2023

## PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

**Pencegahan Benturan Kepentingan (BK)** merupakan serangkaian kegiatan untuk mencegah terjadinya potensi Benturan Kepentingan melalui perbaikan nilai, sistem, dan budaya di lingkungan Badan Informasi Geospasial (BIG). Benturan kepentingan adalah situasi dimana Aparat Sipil Negara (ASN) memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Sebagai wujud komitmen Badan Informasi Geospasial dalam penanganan benturan kepentingan telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung, antara lain:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan Benturan Kepentingan di lingkungan unit kerjanya.
2. Inspektur mengordinasikan pelaksanaan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan. Pada Semester II tahun 2023, dengan diterbitkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor: B-1.1/SESMA/AW.07/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 perihal Penyampaian Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2023.
3. Berdasarkan pelaksanaan pembinaan pengawasan yang telah dilaksanakan sekaligus menjawab Nota Dinas Sekretaris Utama (sebagaimana tersebut pada angka 2), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BIG menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan pencegahan benturan kepentingan di unit kerjanya untuk periode semester II tahun 2023. Berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan Inspektorat, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BIG telah menyampaikan laporan untuk semester II tahun 2023.
4. Untuk meningkatkan pemantauan terhadap benturan kepentingan, diharapkan Unit kerja melakukan internalisasi mandiri terkait penanganan benturan kepentingan, mendokumentasikan pelaporan kondisi potensi benturan kepentingan, serta mengimplementasikan hasil identifikasi potensi benturan kepentingan.

Semester I	Semester II
53 kondisi potensi	71 kondisi potensi

Atas hasil Identifikasi potensi benturan kepentingan dan strategi pencegahan benturan kepentingan dilakukan oleh masing-masing unit eselon II, Inspektorat merekomendasikan:

1. Agar unit kerja melakukan internalisasi mandiri terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh staf di lingkungan unit kerjanya untuk meningkatkan kesadaran pelaporan bilamana kondisi potensi benturan kepentingan terjadi pada pegawai yang bersangkutan.
2. Agar unit kerja mendokumentasikan pelaporan kondisi potensi benturan kepentingan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Agar seluruh unit kerja mengimplementasikan hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya sesuai SK Kepala Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan.

## EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI

**Evaluasi Reformasi Birokrasi** adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Sedangkan Evaluasi Internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Internal Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka memastikan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*).

Evaluasi internal dilakukan pada tahap perencanaan (*ex-ante*) dan tahap pelaksanaan (*on-going*) oleh Evaluator Internal yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BIG Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2023.

### 1. TAHAP PERENCANAAN (*EX-ANTE*)

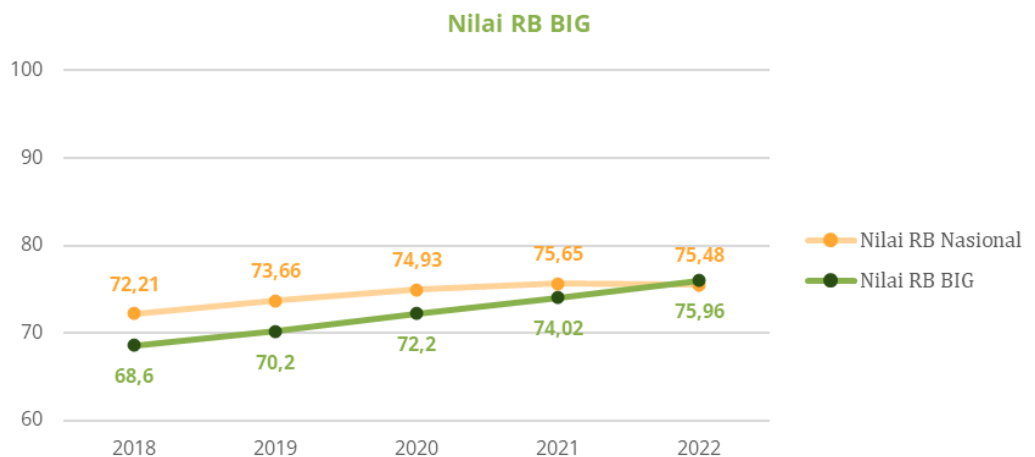
Pada tahap perencanaan (*ex-ante*), Evaluator Internal mempelajari dan menelaah dokumen perencanaan RB berupa dokumen Road Map RB BIG yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BIG nomor 12.1 Tahun 2023, Rencana Aksi RB BIG sesuai Surat Pernyataan Keabsahan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 nomor 13.1/SESMA-BIG/OT.02/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023, dan membandingkannya dengan dokumen Road Map RB Nasional.

### 2. TAHAP PELAKSANAAN (*ON-GOING*)

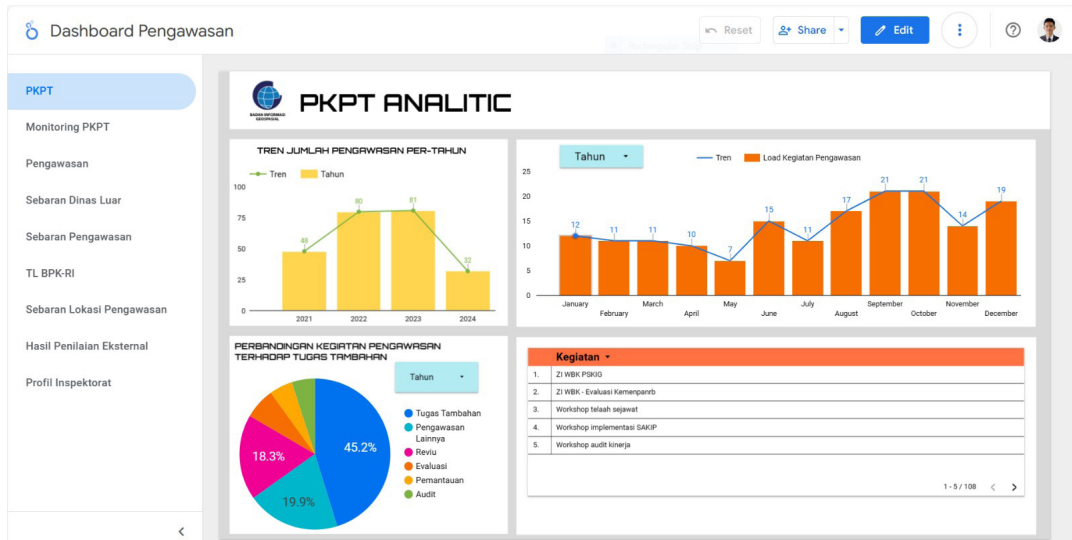
Pada tahap pelaksanaan (*on-going*), Evaluator Internal mempelajari dan menelaah dokumen Rencana Aksi RB BIG dan membandingkannya dengan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan (ketepatan, ketercapaian, kualitas pelaksanaan dan kesesuaian output kegiatan pada setiap triwulan).

## HASIL REFORMASI BIROKRASI BIG

Sebagai wujud implementasi pelaksanaan RB, BIG terus meningkatkan kinerja RB untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB yang dilakukan oleh Kemenpanrb selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai hasil pelaksanaan RB BIG terus mengalami peningkatan, dan bahkan untuk tahun 2022, nilai hasil pelaksanaan RB BIG melebihi nilai rata-rata RB Kementerian/Lembaga secara nasional.



## INOVASI: DASHBOARD PENGAWASAN



Visualisasi adalah rekayasa untuk menampilkan suatu informasi yang disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. hal ini akan mempermudah komunikasi dan mempercepat pengambilan keputusan.

Inspektorat BIG berupaya memanfaatkan fitur yang disediakan melalui google looker studio secara *free* untuk menampilkan visual kegiatan pengawasan yang dilakukan secara historis sebagai dashboard pengawasan. Dashboard pengawasan Inspektorat ini masih digunakan secara internal dan juga sebagai database pengawasan.

Pada Tahun 2024, Inspektorat memiliki rencana pembangunan dashboard pengawasan internal yang berkolaborasi dengan Pusat PPIG dimana dashboard ini akan digunakan lebih luas untuk membantu manajemen.

Visualisasi yang ditampilkan di antaranya:

1. **PKPT Analitic;** fungsi pada menu ini adalah memberikan informasi tren jumlah pengawasan Inspektorat per-tahun, load kegiatan pengawasan per-bulan, dan perbandingan kegiatan pengawasan terhadap tugas tambahan.
2. **Monitoring PKPT;** pada menu ini memberikan informasi secara detail terkait status kegiatan pengawasan yang dapat di-filter berdasarkan tahun, kategori (pengawasan), dan status (selesai - *on process* - belum mulai).
3. **TL BPK-RI;** menampilkan tren temuan dan jumlah rekomendasi pemeriksaan, status rekomendasi hasil pemeriksaan, temuan per-eselon I, dan sisa penyetoran ke kas negara.
4. **Profil Inspektorat;** menu ini menampilkan informasi jumlah pegawai inspektorat, pegawai berdasarkan pendidikan hingga tren diklat yang diikuti auditor.

Diharapkan dengan adanya dashboard pengawasan ini dapat membantu monitoring progres kegiatan tahunan dan bisa menjadi salah satu sumber data untuk pengambilan keputusan.



---

## HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

---

Selama 2023, Inspektorat telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dan pelayanan yang berkaitan dengan pengawasan internal di Badan Informasi Geospasial. Seluruh kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat BIG telah dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan standar. Kegiatan dan pelayanan tersebut menghasilkan rekomendasi yang bisa juga disebut Hasil Pengawasan. Hasil Pengawasan tersebut merangkum hal-hal yang perlu diperhatikan manajemen dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hal-hal yang perlu diperhatikan manajemen adalah sebagai berikut:





- 1** Pengelolaan BMN masih perlu ditingkatkan untuk memastikan keberadaan BMN, kondisi BMN, penetapan status BMN dan proses penghapusan sesuai ketentuan agar nilai BMN dalam Laporan Keuangan menggambarkan kondisi sebenarnya.
- 2** Perlunya peningkatan pengendalian atas proses pengadaan barang/jasa untuk menghindari kesalahan akun, keterlambatan pekerjaan dan kelebihan pembayaran
- 3** Evaluasi atas pengendalian internal dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran masih perlu ditingkatkan serta didokumentasikan dengan baik.
- 4** Perlu adanya pedoman pengelolaan PNBPN di level Lembaga agar terdapat kejelasan pembagian tugas kepada pegawai yang dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNBPN.
- 5** Perlunya mendorong disahkannya peraturan terkait simpul jaringan informasi geospasial untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan pembinaan simpul jaringan secara nasional.
- 6** Tingkat kepatuhan pelaporan LHKAN dari wajib lapor SPT perlu ditingkatkan dari saat ini di angka 95,60% menjadi 100%.



# Laporan Tahunan Inspektorat BIG 2023